



RENJA 2024

**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

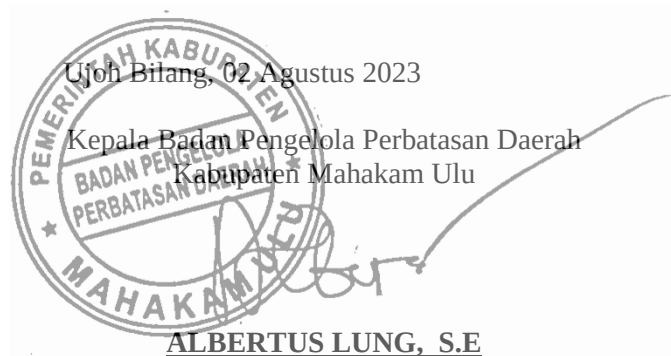


KATA PENGANTAR

Puji Syukur, Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 dapat diselesaikan. Secara umum RENJA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu dalam kurun waktu sisa triwulan tahun ini. Sedangkan secara lebih spesifik, RENJA Badan Pengelola Perbatasan Daerah memuat Isu Strategis khususnya dalam pembangunan di Kawasan perbatasan yang ada di kabupaten Mahakam ulu, dan memperoleh pedoman dalam menentukan arah atau strategi sasaran strategi yang ingin dicapai pada tahun 2024.

Pada akhirnya, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian RENJA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ujon Bilang, 02 Agustus 2023
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu



ALBERTUS LUNG, S.E
Pembina TK.I /IV/b
NIP.19720620 200003 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perubahan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD). Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan, Strategi, Program, Kegiatan Pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui kebijakan (KUPA-PPAS). Renstra Perubahan secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan rencana kerja perubahan setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Mahakam Ulu. Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Secara Substantif tidak melakukan pembangunan langsung atau teknis pembangunan di lapangan melainkan menjadi pendukung dalam pembangunan di Kawasan perbatasan melalui fasilitasi Kerjasama, perencanaan pembangunan, dan evaluasi pembangunan yang ada di Kawasan perbatasan.

Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024, diarahkan untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan perbatasan yang ada di kabupaten Mahakam ulu.

Sedangkan Fungsinya adalah sebagai pendoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kerja agar lebih terarah sesuai dengan visi dan misi kabupaten Mahakam ulu.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disajikan berikut:

- a. Landasan Idiil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : UUD 1945
- c. Landasan Operasional :
 - 1) Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2003 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
 - 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 9) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
 - 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 11) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - 12) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 19) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 20) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 21) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
- 25) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 27) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 28) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);
- 30) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Timur;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 adalah menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Mahakam Ulu 2021-2026.

1.3.2 Tujuan

- 1) Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) PD;
- 2) Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun selama Tahun 2021-2026;
- 3) Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 2021-2026;
- 4) Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang P-RPJMD;
- 5) Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antarwaktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintahan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistimatis Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Sampai Triwulan II
- 2.2 Realisasi Anggaran sampai Triwulan II
- 2.3 Isu-isu Penting dalam Evaluasi

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

- 3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan

BAB IV PENUTUP.

Lampiran (Form E.81 Permandagri No 86 Tahun 2017)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Sampai Triwulan II 2023

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai triwulan II Tahun 2023 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sesuai Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Perbatasan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan II tahun 2023 mencapai target indicator dengan persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 62,66% dari target persentase 100%. dalam tiga kegiatan yang ada didalamnya :
 - Tingkat Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencapai 71,38% dari target 100%.
 - Tingkat Kecepatan Waktu dan Akurasi Pertanggungjawaban Keuangan mencapai 36,54% dari target 100%.
 - Tingkat Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi untuk mendukung Pencapaian Tujuan Organisasi mencapai 75,205 dari target 100%.
 - Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai 91,55% dari target 100%.
 - Tingkat Kelancaran Oprasional Rumah Tangga Kantor mencapai 38,64% dari target 100%.
2. Program Pengelolaan Perbatasan sampai dengan triwulan II tahun 2023 mencapai target indicator dengan persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama 55,71% dari target 100%, Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan 67,80 dari target 100% dan Persentase Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan 89,10% dari target 100%. dalam lima kegiatan yang ada didalamnya :

- Terlaksananya Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama mencapai 55,71% dari target 100%.
- Terlaksananya Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan 67,80 dari target 100%.
- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan 89,10% dari target 100%.

Di tuangkan dalam table sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Target Renstra pada Tahun 2023 Triwulan II	Target Capaian Renstra 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	62,66%	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71,38%	100%
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Tingkat kecepatan waktu dan akurasi pertanggungjawaban keuangan	36,54%	100%
Kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi	75,20%	100%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,55%	100%
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tingkat kelancaran oprasional rumah tangga kantor	38,64%	100%
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Perbatasan	99,80%	100%
Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	55,71%	100%
Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	67,80%	100%
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	89,10%	100%

2.2 Realisasi Keuangan Tahun 2023 Sampai dengan Triwulan II 2023

Dalam pelaksanaan Renja Tahun 2023 telah terdapat realisasi Keuangan sampai dengan triwulan dua oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sesuai Program dan Kegiatan masing – masing yang tertuang dalam table sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 sd Triwulan II 2023 (Rp)	Tertimbang (persentase)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.143.832.061	2.299.439.223	62,66%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.228.900	19.436.900	71,38%
Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	3.074.562.461	1.123.552.523	36,54%
Kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	713.999.600	536.938.600	75,20%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.110.000	165.815.000	91,55
Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.174.160.000	453.696.200	38,64
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	1.160.350.800	732.655.040	55,71
			67,80
			89,10
Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	696.715.600	388.153.840	55,71
Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	321.989.300	218.300.000	67,80
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	141.645.900	126.201.200	89,10

2.3 Isu – Isu Penting dalam Evaluasi

Isu Penting dalam Evaluasi Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023, yang dapat berdampak dalam capaian Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2023. Di antaranya sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya data – data dasar dalam pembangunan di Kawasan perbatasan;
2. Belum terlaksananya Kerjasama lintas OPD dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kawasan Perbatasan;
3. Keterbatasan Kegiatan dan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
4. Belum maksimalnya Kerjasama dengan pemerintahan pusat;

BAB III

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DAERAH**

3.1 Program dan Kegiatan

Dalam Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Terdapat beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berubah pagu dan Penambahan Sub Kegiatan sesuai urgensi kegiatan yang perlu di capai dan beberapa pagu awal yang belum sesuai, sehingga terjadi perubahan.

Adapun rencana kerja perubahan sebagai berikut :

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kecepatan waktu dan akurasi pertanggungjawaban keuangan	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi	100%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat kelancaran oprasional rumah tangga kantor	100%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Wilayah Perbatasan	100%
Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	100%
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	100%
Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	100%

3.2 Tujuan dan Sararan

Tujuan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Tujuan yang dilaksanakan dalam Rencana Kerja (RENJA) untuuk membantu pencapaian Program dan Kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024.

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dana penunjang rutin oprasional masih sangat minim sehingga perlunya penambahan dana/anggaran.
- Program Pengelolaan Perbatasan terdapat kekurangan dana pada plaksanaannya dan membutuhkan tambahan kegiatan pendukung capaian program yang akan dituangkan dalam capaian Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Sasaran Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu adalah :

- Meningkatkan sarana oprasional Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
- Meningkatkan perencanaan, dan pelaporan keuangan;
- Pengelolaan Rumah Tangga Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah yang berkelanjutan;
- Mempercepat proses pembangunan Infrastruktur di Kawasan perbatasan;
- Meningkatkan data – data dasar Kawasan perbatasan;
- Pemeliharaan/Perawatan tanda batas negara;
- Memfungsikan sumber daya alam yang ada dikawasan perbatasan;
- Percepatan Pembangunan di Kawasan Perbatasan di semua bidang;

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah di tuangkan dalam table sebagai berikut :

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana	Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BPPD	Persentase program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	Rp 5,576,902,744	100%	Rp 5,607,993,389		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPPD	Tingkat Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 136,276,583	100%	Rp 136,228,400		
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>BPPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>Rp 40,000,000</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>Rp 39,968,100</i>	<i>APBD</i>	
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>BPPD</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>Rp 15,000,000</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>Rp 14,989,700</i>	<i>APBD</i>	
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja</i>	<i>BPPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>Rp 50,000,000</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>Rp 49,996,000</i>	<i>APBD</i>	
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>BPPD</i>	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>Rp 31,276,583</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>Rp 31,274,600</i>	<i>APBD</i>	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPPD	Tingkat kecepatan waktu dan akurasi pertanggungjawaban keuangan	100%	Rp 3,080,876,161	100%	Rp 3,108,879,989		
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>BPPD</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>14 Orang/Bulan</i>	<i>Rp 2,856,276,161</i>	<i>14 Orang/Bulan</i>	<i>Rp 2,895,828,689</i>	<i>APBD</i>	
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>BPPD</i>	<i>Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>Rp 204,600,000</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>Rp 193,080,000</i>	<i>APBD</i>	
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>BPPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>Rp 10,000,000</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>Rp 9,991,500</i>	<i>APBD</i>	
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	<i>BPPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>Rp 10,000,000</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>Rp 9,979,800</i>	<i>APBD</i>	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPPD	Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi	100%	Rp 850,000,000	100%	Rp 846,630,000		
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	BPPD	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 10,000,000	1 Paket	Rp 9,976,700	APBD	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPPD	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 120,000,000	1 Paket	Rp 119,905,000	APBD	
Kegiatan Penyediaan Bahan Logitis Kantor	BPPD	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 50,000,000	1 Paket	Rp 49,981,400	APBD	
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPPD	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	Rp 50,000,000	1 Paket	Rp 49,938,800	APBD	
Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	BPPD	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket	Rp 35,000,000	1 Paket	Rp 34,978,100	APBD	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPPD	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan	Rp 35,000,000	4 Laporan	Rp 34,928,000	APBD	
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	BPPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8 Laporan	Rp 550,000,000	8 Laporan	Rp 546,922,000	APBD	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPPD	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 120,000,000	100%	Rp 129,110,000		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	BPPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Rp 120,000,000	10 Orang	Rp 129,110,000	APBD	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BPPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 25,000,000	100%	Rp 24,999,400		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BPPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Rp 10,000,000	4 Laporan	Rp 9,999,700	APBD	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	BPPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Rp 15,000,000	2 Dokumen	Rp 14,999,700	APBD	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPPD	Tingkat kelancaran oprasional rumah tangga kantor	100%	Rp 1,186,640,000	100%	Rp 1,184,035,600		
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPPD	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	Rp 10,000,000	12 Laporan	Rp 9,996,000	APBD	
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	BPPD	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	Rp 45,480,000	4 Laporan	Rp 45,480,000	APBD	
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Rp 1,131,160,000	13 Laporan	Rp 1,128,559,600	APBD	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPPD	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 178,110,000	100%	Rp 178,110,000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	BPPD	jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya	6 Unit	Rp 68,110,000	6 Unit	Rp 68,110,000	APBD	

<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>BPPD</i>	<i>jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya</i>	<i>1 Unit</i>	<i>Rp 110,000,000</i>	<i>1 Unit</i>	<i>Rp 110,000,000</i>	<i>APBD</i>	
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Kawasan Perbatasan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Wilayah Perbatasan	100%	Rp 2,667,805,900	100%	Rp 2,414,722,100		
Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Kawasan Perbatasan	Persentase Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	100%	Rp 934,492,700	100%	Rp 934,491,800		
<i>Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah</i>	<i>Kawasan Perbatasan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>Rp 400,000,000</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>Rp 399,999,100</i>	<i>APBD</i>	
<i>Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan</i>	<i>Kawasan Perbatasan</i>	<i>Jumlah rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan yang disusun</i>	<i>7 Dokumen</i>	<i>Rp 534,492,700</i>	<i>7 Dokumen</i>	<i>Rp 534,492,700</i>	<i>APBD</i>	
Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Kawasan Perbatasan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	100%	Rp 928,312,320	100%	Rp 675,334,200		
<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan</i>	<i>Kawasan Perbatasan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>Rp 928,312,320</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>Rp 675,334,200</i>	<i>APBD</i>	
Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Kawasan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	100%	Rp 805,000,880	100%	Rp 804,896,100		
<i>Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan</i>	<i>Kawasan Perbatasan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>Rp 292,313,440</i>	<i>5 Dokumen</i>	<i>Rp 292,295,100</i>	<i>APBD</i>	
<i>Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kawasan Perbatasan</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota</i>	<i>9 Laporan</i>	<i>Rp 195,219,440</i>	<i>9 Laporan</i>	<i>Rp 195,148,200</i>	<i>APBD</i>	
<i>Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara</i>	<i>Kawasan Perbatasan</i>	<i>Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>Rp 317,468,000</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>Rp 317,452,800</i>	<i>APBD</i>	

BAB V

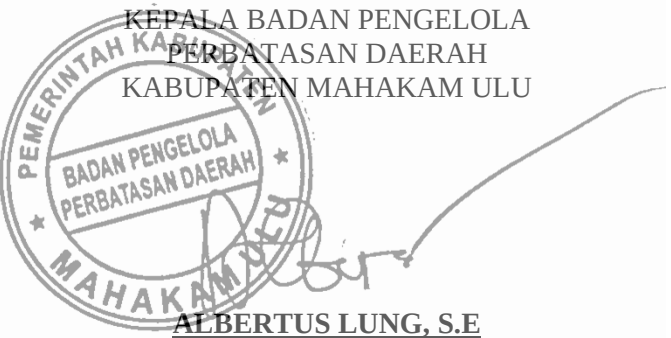
PENUTUP

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perbatasan telah diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat mengentaskan problem pembangunan khususnya dikawasan perbatasan kabupaten Mahakam ulu, juga dilaksanakan dengan sungguh – sungguh meski dengan keterbatasan anggaran yang ada.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu ini mungkin jauh dari harapan, namun dengan segala kemampuan SDM yang ada dengan campur tangan tangan tuhan yang maha esa kiranya kami dapat mampu melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan kepada kami daengan baik.

Ujoh Bilang, 02 Agustus 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA
PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU



ALBERTUS LUNG, S.E
PEMBINA TK.I /IV/b
NIP. 19720620 200003 1 003